



LAPORAN AKHIR PENELITIAN 2022
HIBAH LPPM-UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta
Tahun Usulan 2022, Tahun Pelaksanaan 2022

1. Judul *)

Sinergitas Pemerintah Lokal, Elit Lokal dan Komunitas Dalam Penyiapan Pencegahan Konflik Horisontal di wilayah Rawan Konflik

2. Topik *)

Sosial Budaya dan Kemanusiaan; Demokrasi dan Budaya Politik

3. Bidang Ilmu *)

-Ilmu Politik;

4. Identitas Peneliti *)

| Peran | Nama | Sinta ID / NIM | Fakultas | Bidang Studi |
|-----------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|
| Ketua Pengusul | LUSI ANDRIYANI | 6020076 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Politik |
| Anggota Dosen 1 | HENNI WIJAYANTI S.H. | - | Fakultas Hukum | Ilmu Hukum |
| Anggota Dosen 2 | Dr MOHAMMAD NASIH M.Si, S.Th.I | - | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Politik |
| Anggota Mhs 1 | Luthfiyani Nurul Jannah | 2019130022 | - | - |
| Anggota Mhs 2 | Putri Ade Fitriani | 2019130045 | - | - |

5. Pengesahan Usulan *)

| Tanggal Pengajuan | Tanggal Persetujuan | Nama Pimpinan Pemberi Persetujuan | Jabatan | Nama Lembaga/Fakultas |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------|
| - | - | - | - | - |

| Tanggal Pengajuan | Tanggal Persetujuan | Nama Pimpinan Pemberi Persetujuan | Jabatan | Nama Lembaga/Fakultas |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------|
| - | - | - | - | - |

6. Riwayat Penelitian Ketua Pengusul *)

**Hibah Penelitian Internal
Tahun Pelaksanaan 2020
Penyelenggara LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta
Judul Proposal "RELASI KUASA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MASYARAKAT URBAN"**

**Hibah Penelitian Ristekdikti
Tahun Pelaksanaan 2010
Penyelenggara Lembaga Riset dan Pendidikan Tinggi
Judul Proposal "PEMODELAN POLITIK IDENTITAS PADA PARTAI POLITIK DALAM MENDUKUNG**

Note: *) jangan diisi/dirubah

PENCIPTAAN KEHIDUPAN DEMOKRASI TANPA KEKERASAN"

Hibah Penelitian Ristekdikti

Tahun Pelaksanaan 2010

Penyelenggara Lembaga Riset dan Pendidikan Tinggi

**Judul Proposal "PEMODELAN POLITIK IDENTITAS PADA PARTAI POLITIK DALAM MENDUKUNG
PENCIPTAAN KEHIDUPAN DEMOKRASI TANPA KEKERASAN"**

Hibah Penelitian Ristekdikti

Tahun Pelaksanaan 2010

Penyelenggara Lembaga Riset dan Pendidikan Tinggi

**Judul Proposal "PEMODELAN POLITIK IDENTITAS PADA PARTAI POLITIK DALAM MENDUKUNG
PENCIPTAAN KEHIDUPAN DEMOKRASI TANPA KEKERASAN"**

Hibah Penelitian Ristekdikti

Tahun Pelaksanaan 2011

Penyelenggara Lembaga Riset dan Pendidikan Tinggi

**Judul Proposal "PEMODELAN POLITIK IDENTITAS PADA PARTAI POLITIK DALAM MENDUKUNG
PENCIPTAAN KEHIDUPAN DEMOKRASI TANPA KEKERASAN"**

Hibah Penelitian Ristekdikti

Tahun Pelaksanaan 2012

Penyelenggara Lembaga Riset dan Pendidikan Tinggi

**Judul Proposal "PENELITIAN DESENTRALISASI KATEGORI HIBAH BERSAING DENGAN JUDUL :
POLA PENGEMBANGAN MODEL IDENTITAS KOTA (CITY BRANDING) SEBAGAI MARKETING
VALUE DALAM ERA OTONOMI DAERAH"**

Hibah Penelitian Ristekdikti

Tahun Pelaksanaan 2016

Penyelenggara Lembaga Riset dan Pendidikan Tinggi

**Judul Proposal "PENELITIAN DESENTRALISASI KATEGORI UNGGULAN PT DENGAN JUDUL :
PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GENDER SEBAGAI UPAYA UNTUK
MENDUKUNG PELAKSANAAN CLEAN AND GOOD GOVERNANCE BAGI APARAT PEMERINTAHAN
DESA DI KOTA TANGERANG SELATAN"**

Hibah Penelitian Ristekdikti

Tahun Pelaksanaan 2016

Penyelenggara Lembaga Riset dan Pendidikan Tinggi

**Judul Proposal "PENELITIAN DESENTRALISASI KATEGORI UNGGULAN PT DENGAN JUDUL :
PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GENDER SEBAGAI UPAYA UNTUK
MENDUKUNG PELAKSANAAN CLEAN AND GOOD GOVERNANCE BAGI APARAT PEMERINTAHAN
DESA DI KOTA TANGERANG SELATAN"**

Hibah Penelitian Ristekdikti

Tahun Pelaksanaan 2018

Penyelenggara Lembaga Riset dan Pendidikan Tinggi

Judul Proposal "MILITERISASI SIPIL : STUDI PADA FPI"

Hibah Pengabdian Masyarakat Ristekdikti

Tahun Pelaksanaan 2020

Penyelenggara Lembaga Riset dan Pendidikan Tinggi

Judul Proposal "STRATEGI PEREMPUAN PENGGIAT BANK SAMPAH DI KOTA TANGSEL"

Hibah Penelitian Internal

Tahun Pelaksanaan 2020

Penyelenggara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Judul Proposal "ADVOKASI KEBIJAKAN PERKOTAAN RAMAH LANSIA DI SURABAYA DAN
JAKARTA"**

Hibah Penelitian Internal

Tahun Pelaksanaan 2021

Penyelenggara LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta

Judul Proposal "COMMUNITY RESILIENCE KONFLIK PASCA PILKADA DALAM MENDUKUNG

SOCIAL SUSTAINABILITY DI WILAYAH JAKARTA "

Hibah Pengabdian Masyarakat Internal

Tahun Pelaksanaan 2021

Penyelenggara LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta

**Judul Proposal "PENDATAAN DAN PENDAMPINGAN LANSIA DI RW 10 KELURAHAN CIPAYUNG,
CIPUTAT TANGERANG SELATAN"**

Hibah Pengabdian Masyarakat Internal

Tahun Pelaksanaan 2021

Penyelenggara LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta

**Judul Proposal "PEMBERDAYAAN EKONOMI DISABILITAS NETRA DI KELURAHAN PONDOK CABE
ILIR"**

Judul, tuliskan judul usulan penelitian

JUDUL USULAN

Sinergitas Pemerintah Lokal, Elit Lokal dan Komunitas Dalam Penyiapan Pencegahan Konflik Horisontal di wilayah Rawan Konflik

Internalisasi AL ISLAM dan KEMUHAMMADIYAHAN dalam Penelitian maksimal 500 kata

AL ISLAM dan KEMUHAMMADIYAHAN

Islam merupakan agama yang mengajarkan kebaikan dan menjadi rahmatan lil alamin. Islam mengatur tatacara kehidupan baik yang berhubungan dengan hablumminalloh amupun hablumminannas. Banyak sekali kisah yang terkait dengan kehidupan manusia, salah satunya berkaitan dengan penyelesaian dan pencegahan konflik sosial. Kisah perseteruan Habil dan Qabil, nabi Nuh dan kaumnya, nabi Ibrahim dengan Abrahah, nabi Musa dengan Fir'aun begitu juga dengan kaum muslimin dan kaum qurais mencerminkan bahwa manusia hidup di dunia selalu mengalami dinamika. Dalam hal ini Al-qur'an sebagai kitab suci umat Islam telah menjelaskan dalam alqur'an surat Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan Ingatlah tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Berkata mereka: Apakah Engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memuji Engkau dan memuliakan Engkau? Dia berkata: Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Dalam ayat tersebut menggambarkan bahwa adanya kerusakan dan kejahatan dimuka bumi dilakukan oleh manusia. Hal ini sebagai pengingat bagi kaum muslimin untuk senantiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Tidak bisa dipungkiri, konflik selalu hadir dalam kehidupan manusia di bumi. Kehidupan manusia dalam segala lingkup syarat akan konflik sosial. Sebagai umat Islam, pedoman al-qur'an menjadi kunci bagi kita untuk bisa menjalani kehidupan didunia dengan baik.

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan.

RINGKASAN

Konflik yang terjadi di masyarakat tidak hanya konflik yang disebabkan faktor sosial dan ekonomi, namun juga faktor politik. Hadirnya pemilihan langsung pada saat Pemilu atau Pilkada saat ini telah memunculkan eksistensi konflik sosial ditingkat horisontal dalam rentang waktu yang lama, bahkan sampai pada pemilu atau pilkada tahun berikutnya. Terkait hal tersebut penting dibangun sinergitas yang kuat antara pemerintah lokal, elit lokal dan komunitas yang ada di masyarakat untuk berperan penting sebagai aktor pencegahan dan penyelesaian konflik. Pemerintah lokal dan elit lokal selama ini melakukan tindakan melalui program pencegahan konflik sebelum perhelatan pemilu atau pilkada dilaksanakan. Kegiatan tersebut seringkali belum menjadi fokus program, baik pemerintah lokal, elit lokal dan komunitas masyarakat. Sehingga kondisi tersebut dapat mengganggu *social sustainability* khususnya dalam jalinan kehidupan masyarakat yang longgar karena konflik politik. Berdasarkan kondisi yang ada di masyarakat tersebut, **Tujuan Penelitian:** untuk mengkaji 1) bagaimana tingkat kesiapan pemerintah lokal dan elit lokal dalam menyiapkan pencegahan dan penanganan konflik di masyarakat. 2) Mengapa konflik karena kegiatan politik seperti Pemilihan umum/Pilkada berlangsung lama di masyarakat. 3) Bagaimana dampak konflik terhadap *social*

sustainability. **Tahapan Penelitian:** Pengambilan data dilakukan di wilayah Tangerang Selatan sebagai bagian dari Provinsi Banten. Wilayah Banten merupakan wilayah rawan konflik dari 10 wilayah yang menjadi prioritas POLRI pada tahun 2019. **Target Luaran;** penelitian ini adalah **Luaran Wajib:** 1 artikel jurnal nasional, Poster, **Luaran Tambahan:** HAKI, Prosiding nasional. Penelitian ini sejalan dengan Rencana Induk Penelitian (**RIP**) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), yaitu kajian tentang budaya politik masyarakat yang mempunyai daya dukung dalam penguatan demokrasi di tingkat lokal. **Hasil Penelitian;** A) Faktor Penyebab Konflik Horisontal; Konflik internal parpol, ketidak siapan untuk kalah, konflik berasal dari kepentingan ormas, hadirnya media, buzzer, lembaga survey yang tidak bertanggungjawab. B) Isu yang berkembang pada proses pemilu: Memilih Figur, pendidikan politik. C) Tingkat kesiapan pemerintah lokal dan elit lokal dalam menyiapkan pencegahan dan penanganan konflik di masyarakat. (1) Tahapan Sebelum Pemilu/Pilkada dilaksanakan: Mengeluarkan surat edaran, Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pendidikan Politik, Evaluasi dan Silaturahmi ke masyarakat. (2) Tahapan Pada Pelaksanaan Pemilu/pilkada: Menjaga jarak dengan Pemerintah daerah, Melibatkan Tokoh Agama, Satpol PP dan Ormas: Tidak mengobrol Janji-janji politik. (3) Tahapan paska Pemilu/Pilkada: Konsolidasi dengan tokoh, kunjungan ke tokoh. D) Upaya Mitigasi Konflik: Menyiapkan program pembahasan potensi konflik, memetakan scope/wilayah jangkauan konflik, kerjasama dan osialissasi politik, Pemetaan model konflik, sumber konflik dan kantong-kantong konflik

Kata kunci maksimal 5 kata

KATA KUNCI

Sinergitas pemerintah lokal, konflik horizontal, wilayah rawan konflik, elit lokal, komunitas

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian.

LATAR BELAKANG

Sejak tahun 2005-2019 telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara penuh [1] [2]. Sebagai mekanisme demokrasi yang didesign untuk meminimalisir konflik di masyarakat serta mencegah konflik dalam pemilihan kepemimpinan, sehingga tidak terjadi konflik sosial dan kekerasan. [3]. Pilkada di Indonesia memiliki logika dasar bekerja dalam demokrasi elektoral yaitu; *pertama*, pemilu dibangun atas basis pondasi preferensi individu *one man, one vote, one voice* yang didasarkan atas basis sosial (*socially bounded Individu*). *Kedua*, logika “*winner take all*”, siapa yang menang, maka dia yang akan mendapatkan segalanya”, sementara bagi yang kalah harus menunggu lima tahun lagi. Kondisi ini menciptakan “gerbong” birokrasi atas dasar basis sosial dilingkup pemerintahan daerah. Logika *winner take all*, menjelaskan tentang adanya dominasi elit. Dalam konteks inilah peran elit sangat dibutuhkan untuk aktif dalam melakukan pencegahan konflik sosial Pilkada [3].

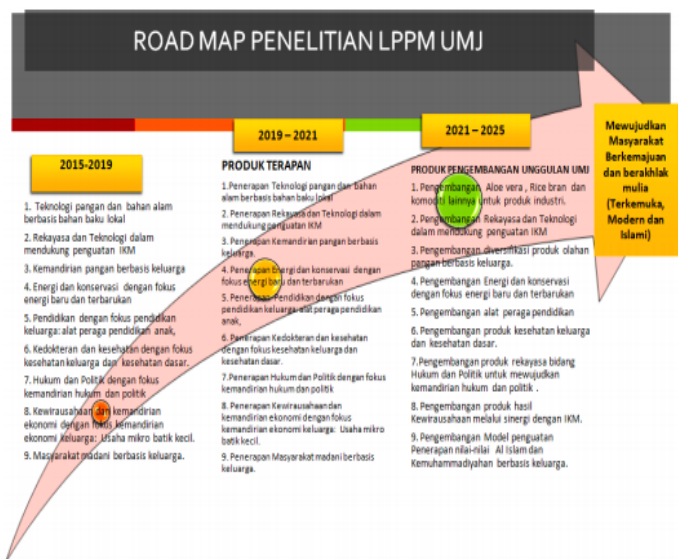
Konflik yang terjadi sering berujung pada kekerasan dan konflik horisontal[4]. Konflik dimulai dari hubungan yang rusak didalam keluarga, tetangga, bermusuhan berdasarkan ras, suku dan agama [5]. Data menunjukkan Pilkada tahun 2015-2014 di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berlangsung selama 1.027 kali yang telah memunculkan konflik 1.323 insiden kekerasan dan 829 bangunan rusak. 648 insiden perusakan berskala kecil [13]. Tahun 2017, terdapat 53 permohonan sengketa hasil pilkada yang diajukan ke MK yang terdiri atas 40 kabupaten, 9 kota, dan 4 provinsi. Pilkada 2018 dengan 171 wilayah pemilihan, terdapat kabupaten/kota paling rawan yang terdapat di wilayah Indonesia Timur; Papua, NTT, Maluku [6].

Dalam kondisi ini, mekanisme demokrasi yang ada telah menjadi legitimasi munculnya kekerasan akibat perbedaan pandangan pada saat pemilihan pemimpin baru. Konflik ini muncul karena masing-masing pihak sulit mentolerir kepentingan yang bermain. Gambaran design demokrasi yang ada di Indonesia melalui penyelenggaraan Pilkada dianggap telah gagal sebagai cara mentransformasikan konflik. Potensi konflik horizontal yang ada di masyarakat akibat pilkada. Kondisi ini dapat dikurangi dengan cara Edukasi dan literasi yang cukup kepada masyarakat untuk

memberikan pemahaman bahwa pemilu merupakan hal yang biasa untuk memilih pemimpin harapan rakyat dan mencegah masyarakat dari isu hoaks [2]. Pemerintah dan elit lebih menyiapkan cara preventif dalam meminimalisir konflik horisontal. Namun saat ini perkembangan konflik justru terjadi dalam rentang waktu lama sehingga mengganggu kehidupan masyarakat (*social sustainability*).

Urgensi penelitian ini yaitu sejauh mana langkah pemerintah dan elit untuk mencegah dan mengatasi konflik pasca pilkada di masyarakat sehingga masyarakat bisa hidup normal tanpa terpecah belah karena pilihan yang berbeda. **Tujuan Penelitian** ini adalah untuk mengetahui: 1) tingkat kesiapan pemerintah lokal dan elit lokal dalam menangani konflik horizontal di masyarakat akibat dari kegiatan politik. 2) Faktor penyebab konflik horizontal berlangsung lama di masyarakat. 3) Dampak konflik horizontal akibat kegiatan politik terhadap *social sustainability*.

Penelitian ini sejalan dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), yaitu kajian tentang “Demokrasi dan Budaya Politik” terkait dengan budaya politik masyarakat yang mempunyai daya dukung dalam penguatan demokrasi di tingkat lokal, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1: Roadmap Penelitian UMJ Tahun 2020-2025 (www.lppm.umj.ac.id)

| NO | BIDANG | SUB TOPIK PENELITIAN |
|----|--|---|
| 1 | Pengembangan Sains, Teknologi, Industri dan Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> a. Teknologi Pangan b. Produk Herbal Bahan Alam c. Industri Kreatif Skala IKM dan UMKM d. Keamanan Pangan e. Energi Baru dan Terbarukan f. Kemandirian dan Konservasi Energi g. Rekayasa Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Maju h. Rekayasa perangkat lunak i. Arsitektur berkelanjutan j. Lingkungan dan Teknologi k. Bioteknologi dan Obat-Obatan l. Industri Berkelanjutan |
| 2 | Pendidikan, Kedokteran, Kesehatan, Sosial dan Ekonomi | <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Keluarga dan Masyarakat b. Pendidikan Islam c. Kedokteran dan Kesehatan keluarga d. Kesehatan Lingkungan dan K3 e. Pelayanan Kesehatan dan Gizi f. Penanggulangan Bencana g. Ekonomi Bisnis Syariah h. Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif i. Kajian Halal dan Thoyib |
| 3 | Sosial Budaya dan Kemanusiaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Politik dan Hukum b. Demokrasi dan Budaya Politik c. Pluralisme dan Sikap Toleran d. Human dan Sosial Kapital e. Hak Azazi Manusia f. Perlindungan Perempuan dan Anak |

Gambar 2. Topik-topik Unggulan Penelitian UMJ Tahun 2020-2025 (www.lppm.umj.ac.id)

Tinjauan Pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art*. Wajib Menampilkan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti (ketua peneliti). Bagan dan road map dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

TINJAUAN PUSTAKA

State of the art dalam kajian ini sinergitas elit, komunitas dalam melihat konflik dan ketahanan sosial sebagai pijakan analisis. Konflik menurut Coser terjadi di antara kelompok dalam masyarakat dapat mempengaruhi hubungan kebiasaan serta melemahkan kreativitas. Benturan nilai dan kepentingan, memunculkan ketegangan antara kelompok antara kepentingan pribadi dan kelompok baru yang menuntut adanya kekuasaan, kekayaan dan status mereka [7]. Bagi Kriesberg, konflik sosial memiliki landasan obyektif, yaitu mengejar tujuan yang berlawanan. Lawan mengejar tujuan mereka dengan menghitung biaya dan manfaat dari berbagai strategi. Penilaian mereka dipengaruhi oleh ketakutan, kebencian, stereotip, dan informasi yang salah. Jalannya dan hasil dari konflik lebih ditentukan oleh interaksi lawan yang bertentangan daripada oleh karakteristik internal mereka. Kerangka Kriesberg dibangun berdasarkan pada kasus persuasif dengan menempatkan posisi

lawan dan tingkat organisasinya sebagai variabel penting [8]. Kondisi inilah yang menjadikan masyarakat mengalami kerentanan akibat konflik. Untuk itu kajian yang terkait dengan **Sinergitas Pemerintah Lokal, Elit Lokal dan Komunitas Dalam Penyiapan Pencegahan Konflik Horizontal di wilayah Rawan Konflik** menjadi penting. *State of the art* kajian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3. State of The art

Kasus yang menggambarkan pola pencegahan konflik horizontal karena kegiatan politik (pemilu dan pilkada) dapat tergambar pada kegiatan pemilu dan Pilkada tahun lalu. Dari kegiatan Pilkada di Indonesia, telah dilakukan pemetaan konflik Pilkada yang terkait dengan ketidak matangan kebijakan umum Pemerintah. Bentuk aturan main dan kecukupan waktu implementasi yang akhirnya melahirkan kelemahan dalam Pilkada terkait dengan, daftar Pemilih Belum Jelas, Sarana-Prasarana Pengawasan Tidak memadai, Pengiriman Surat Suara Terlambat, Psikologi calon dan pendukung tidak siap, sosialisasi tidak maksimal, KPU belum berpengalaman [12]. Intimidasi dan ancaman kekerasan yang bersifat SARA juga sering kali terjadi, namun sulit untuk diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang ada. Kampanye berbau SARA yang marak sangat cepat menyebar. Bawaslu dan jajarannya hingga tingkat lokal dinilai masih lambat dan normatif sehingga tidak mampu mengelola peristiwa-peristiwa yang tendensinya dapat bertentangan dengan prinsip pemilu yang demokratis. Bawaslu juga belum memiliki instrumen pengawasan yang terstandarisasi dan terukur untuk mendeteksi dini politisasi isu SARA dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada yang dapat mengancam prinsip pemilu yang luber dan jurdil [13]. Untuk itu perlu dibangun sinergitas yang kuat antara Pemerintah Lokal, Elit Lokal dan Komunitas Dalam Penyiapan Pencegahan Konflik Horizontal di wilayah Rawan Konflik.

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengurus sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian bisa saja dilakukan dalam situasi yang wajar melalui pengamatan terhadap orang dan lingkungan hidupnya. Peneliti turun ke lapangan, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mengadakan pengamatan dan penjelajahan. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan [19]. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu dua tahun. Dalam periode tersebut, peneliti akan menginvestigasi pemangku kepentingan yang ada **Tangerang Selatan Provinsi Banten**; pemerintah kota, elit lokal, komunitas masyarakat terkait dengan upaya yang dilakukan dalam menangani konflik horisontal. Pemerintah lokal, elit lokal serta komunitas masyarakat yang berpengaruh kami jadikan informan dan sumber informasi untuk kajian sinergitas pemerintah lokal, elit lokal dan komunitas untuk pencegahan konflik dalam mendukung *social sustainability*. Ketiganya mempunyai peran penting dalam menyelesaikan konflik di tingkat lokal. Pemerintah lokal mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya, terutama mendorong masyarakat untuk mempunyai tingkat *resilience* yang tinggi untuk menghadapi horisontal. Elit lokal dan komunitas masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk meredam konflik sosial yang berkepanjangan akibat Pemilu atau Pilkada.

Pengambilan data akan dilakukan di wilayah Tangerang Selatan Provinsi Banten dipilih berdasarkan tingkat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang sangat tinggi. Indeks ini dikeluarkan oleh Bawaslu RI tahun 2020. Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan mengambil 4 pejabat di wilayah kota Tangsel-Banten, KPU dan Bawaslu Tangsel, elit lokal Tangsel, serta 2 informan dari komunitas masyarakat Tangsel.

Sedangkan tehnik pengambilan data dalam penelitian ini akan menggunakan **wawancara mendalam (*indepth interview*)/ FGD, observasi dan studi dokumentasi**. Wawancara mendalam dan FGD akan dilakukan kepada pejabat pemerintah kota untuk mengetahui program apa saja yang di siapkan untuk mencegah konflik horisontal. Wawancara kepada elit lokal untuk mendapatkan informasi peran dan kiprah elit lokal dalam menangani konflik horisontal. Komunitas masyarakat menjadi objek kajian karena mereka mempunyai kelompok yang dapat menginisiasi kegiatan penanganan konflik horisontal. Pengambilan data terhadap pemerintah lokal dan elit lokal serta komunitas akan difokuskan pada wilayah Tangsel-Banten.

Tugas Tim Peneliti:

Peran ketua peneliti (8 jam/minggu): Dr. Lusi Andriyani, M.Si

- Bertanggungjawab terhadap kegiatan penelitian,
- Mengkoordinasikan tim,
- Menganalisis data penelitian
- Bersama tim menyusun laporan penelitian.

Peran Anggota Peneliti 1, dan Mahasiswa (6jam perminggu): Henny Wijayanti, SH.,MH

- Membantu ketua Peneliti merumuskan desain penelitian,
- Pengambilan data,
- Menganalisis data,
- Menyusun laporan penelitian,
- dan menyusun luaran hasil penelitian (Poster-HAKI), Draft prosiding

Peran Anggota Peneliti 2 dan Mahasiswa (6jam perminggu): Dr. Mohamad Nasih

- Membantu ketua Peneliti merumuskan desain penelitian,
- Pengambilan data,
- Menganalisis data,
- Menyusun laporan penelitian,
- Menyusun luaran hasil penelitian (1 jurnal nasional terakreditasi)

Tindak Lanjut, uraikan tindak lanjut dari pelaksanaan penelitian dalam Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengajaran. Narasikan maksimal dalam 500 kata

TINDAK LANJUT

Hasil dari penelitian akan diterapkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat dengan fokus pada tema pencegahan konflik horizontal menjelang dan paska pelaksanaan pemilihan umum dan pilkada di wilayah Tangerang Selatan. Kegiatan tersebut akan berkolaborasi dengan Bakesbangpolinmas, KPUD, Baswalu Tangsel serta Pemerintah Kota Tangsel.

Hasil Penelitian

HASIL PENELITIAN:

Dalam penelitian yang terkait dengan “Sinergitas Pemerintah Lokal, Elit Lokal dan Komunitas Dalam Penyiapan Pencegahan Konflik Horisontal di wilayah Rawan Konflik” .ada beberapa point yang akan dijelaskan dalam pembahasan dengan berdasarkan pada data sekunder dan hasil wawancara tokoh. Point penting antara lain: faktor dan isu penyebab konflik politik saat pelaksanaan pemilu atau pilkada, kesiapan pemerintah dalam mencegah dan menangani konflik pemilu dan pilkada, serta upaya mitigasi konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah di wilayah Tangerang Selatan.

A. Faktor Penyebab Konflik Horisontal:

Dalam menjelaskan tentang upaya mencegah konflik horizontal di masyarakat pada saat kegiatan dan aktivitas politik berlangsung terlebih dahulu kita memetakan sebab-sebab konflik yang seringkali muncul dalam kegiatan politik, baik yang bersumber dari internal partai politik maupun yang berasal dari lingkungan serta internal calon yang terkait dengan ketidaksiapan calon dalam menerima kekalahan. Dengan memetakan penyebab dan sumber konflik kita akan bisa dicari benang merah tahapan-tahapan yang sesuai untuk melakukan pencegahan serta mitigasi konflik politik yang diakibatkan oleh kegiatan Pemilu dan Pilkada di wilayah Tangerang Selatan.

Dari hasil wawancara dan data sekunder yang terkumpul, diperoleh beberapa penyebab konflik di masyarakat, antara lain:

1. Konflik internal parpol

Hampir setiap partai terjadi konflik internal terkait suara, bahkan konflik tersebut diselesaikan sampai pengadilan dengan pelaporan kecurangan suara. Bahwa suara diambil oleh anggota atau calon legislatif nomor yang di atasnya dalam satu partai. Selalu agak sulit dibuktikan dipengadilan tentang suara tersebut, karena mereka hanya memegang catatan dari diri sendiri, sementara KPU diminta untuk membuka kotak suara untuk menghitung kembali jumlah surat suara yang dicoblos. Kondisi tersebut mengakibatkan bukti yang dihadirkan tidak kuat. Solusi terakhir selalu ada di pengadilan. Jalan menyelesaikan konflik melalui pengadilan ditempuh karena musyawarah di internal partai dan KPU tidak mendapatkan hasil yang memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan harus ada kesepakatan terlebih dahulu, dimana apabila kalau kalah harus menerima dan kalau menang yang juga diterima. Penyelesaian konflik internal juga dapat diselesaikan diluar pengadilan melalui musyawarah internal partai karena ada rasa malu apabila konflik tersebut diekspose. Ada yang dimusyawahkan di kelurahan yang terkait saudara dengan saudar karena perbedaan pilihan, peristiwa ini terjadi di Pondok Aren.

2. Ketidak siapan untuk kalah.

Dalam setiap kompetisi, termasuk pelaksanaan pemilu dan pilkada dibutuhkan sikap yang kuat untuk menerima kekalahan dari kompetisi tersebut. Sehingga dengan sikap menerima kekalahan yang bagus, maka akan dapat mengurangi ekses konflik sosial. Hal yang terjadi dilapangan pada saat pelaksanaan Pilkada di Tangerang Selatan, justru menunjukkan fenomena ketidak siapan dari salah satu peserta untuk menerima kekalahan. Di pilkada Tangerang Selatan terdapat tindakan atau perilaku provokasi yang dilakukan oleh provokator melalui tindakan penurunan spanduk lawan politik/kandidat lainnya. Tindakan tersebut sampai pada tindakan yang mengarah ke pidana, dimana dilakukan dengan mencelakai orang lain. Yang terjadi di Pilkada Tangerang Selatan, ditemukan peristiwa dimana dari salah satu tim peserta Pilkada yang memasang spanduk ditabrak sampai patah pingang. Kejadian tersebut sudah masuk pada kejadian kriminal. Setelah dilakukan penelusuran, diajak komunikasi, dirangkul dan diajak ngobrol ditemukan bahwa tindakan tersebut akibat dari ketidak siapan untuk kalah, terutama ketidak siapan untuk rugi dari modal yang telah mereka keluarkan sebagai biaya politik. Upaya yang ditempuh dengan melakukan silaturahmi mampu mengurangi ekses konflik sosial akibat kegiatan politik. namun dari kegiatan lainnya seperti pileg, kondisi tersebut akan terjadi secara luar. Hal inilah yang menjadikan pendekatan hukum dapat ditempuh.

3. Konflik berasal dari kepentingan ormas

Keterlibatan ormas seperti PP, FBR, forkabi, pppkb, juga terlibat dalam kegiatan tersebut. Pernah dilakukan pertemuan dengan forkabi atau FBR. Upaya untuk pemberdayaan Ormas dengan membuat koperasi juga dilakukan. Namun ormas tidak menyambut dengan antusias. Ormas cenderung melakukan kegiatan yang sifatnya pragmatis (mengandalkan otot) bukan dengan program-program yang sifatnya pemberdayaan. Upaya untuk mengajak ormas dengan melakukan program pelatihan juga tidak membuahkan hasil, ormas hanya maunya instan. Dengan melihat kondisi tersebut maka Kapolres Ciputat melakukan tindakan tegas atas perilaku ormas sampai pada tindakan memenjarakan apabila ormas sudah melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat umum, terutama terkait dengan lahan parkir. Ormas masih mempunyai kepentingan untuk mencari uang atau keuntungan dari partai politik, calon legislative atau calon kepala daerah yang ikut kompetisi. Kondisi ini akan menjadi masalah besar apabila antara ormas dan pihak yang berkompetisi saling mencari keuntungan. Untuk mencari keuntungan, mereka tidak merasa bersalah dimana kedua belah pihak saling memanfaatkan.

4. Hadirnya media, buzzer, lembaga survey yang tidak bertanggung jawab.

Konflik akibat kegiatan Pemilu, Pileg dan Pilkada juga dipengaruhi media, buzzer, lembaga survey, dan black campaign.

Isu yang berkembang pada proses pemilu:

1. Memilih Figur:

Pemilihan umum, Pileg dan Pilkada adalah persoalan memilih figur bukan partai. Isu yang muncul selalu menyentuh pada aspek pribadi. Hal itu yang memancing emosi massa-massa yang tidak terdidik.

2. Pendidikan Politik:

Pendidikan politik dikeluarkan menjadi isu paling penting. Dimana yang terdidik harus menularkan info kepada mereka yang punya hak pilih. Kegiatan sosialisasi menjadi penting untuk dilakukan di sekolah atau pesantren dengan didampingi tokoh dll.

B. Tingkat kesiapan pemerintah lokal dan elit lokal dalam menyiapkan pencegahan dan penanganan konflik di masyarakat.

Tangerang Selatan merupakan bagian dari wilayah yang mendapatkan perhatian khusus dari kepolisian terkait dengan konflik yang diakibatkan oleh kegiatan politik. Dalam tahapan pencegahan konflik dan penanganan konflik di masyarakat, terutama konflik yang diakibatkan Karena adanya kegiatan politik. Untuk itu perlu di siapkan program yang mendukung adanya pencegahan konflik sosial akibat dari kegiatan politik. Terdapat beberapa program dan tahapan yang dapat dinarasikan dari konflik tersebut:

Tahapan Sebelum Pemilu/Pilkada dilaksanakan:

1. Mengeluarkan surat edaran:

Sebelum pemilu dilaksanakan jauh-jauh hari pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran kepada masyarakat melalui lurah atau camat untuk tidak melakukan kegiatan yang berbau provokasi. Surat edaran yang dibuat merujuk kepada atauran yang diterbitkan KPU, misalnya berkaitan dengan aturan pemasangan pamphlet, tidak boleh ditempat ibadah dan sekolah. Tatacara menuliskan kalimat-kalimat yang dispanduk tidak boleh menuliskan kalimat yang sifatnya provokasi. Apabila ada spanduk yang menuliskan kalimat-kalimat provokasi, maka sat pol PP akan langsung menurunkan spanduk tersebut, walau tempatnya benar.

2. Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pemerintah daerah menekankan kepada kembali terkait sikap netarlaitas ASN. Dimana ASN harus berlaku netral sesuai aturan. Apabila terdapat ASN yang ikut serta berpolitik maka harus keluar dari ASN. ASN yang melanggar atutan akan diproses dan diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan kepada ASN dapat berupa penuruann pangkat, penundaan gaji selama beberapa bulan. Untuk di wilayah Tangerang Selatan belum didapati ASN yang dikeluarkan.

3. Pendidikan Politik:

Pendidikan politik menjadi harl penting dalam menyiapkan masyarakat untuk lebih dewasa dan terbuka menerima kekalahan. Pendidikan politik juga mendorong masyarakat untuk lebih cerdas dalam menyikapi kondisi yang ada. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan melalui Bakesbangpol melaksanakan program pendidikan politik. Pendidikan politik dilaksanakan sebelum sampai sesudah pemilu berdasar gender dan ormas. Tahun 2022 ini Bakesbangpol Kota Tangerang Selatan telah menyelenggarakan 3 angkatan dengan peserta total 1000 orang lebih.

4. Evaluasi dan Silaturahmi ke masyarakat

Menjelang pemilu dilaksanakan, pemerintah daerah bersama Kapolres dan Kajari serta Dandim melakukan evaluasi dan silaturahmi kepada masyarakat untuk menekankan bahwa kami hadir dimasyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu kahwatir kalau ada yang melakukan provokasi bisa melaporkan langsung.

Tahapan Pada Pelaksanaan Pemilu/pilkada

1. Menjaga jarak dengan Pemerintah daerah

Pada waktu pelaksanaan pemilu/Pilkada, peserta seyogyanya mengambil posisi agak jauh dan menjaga jarak karena kewenangan ada di KPU dan bawaslu.

2. Melibatkan Tokoh Agama, Satpol PP dan Ormas:

Keterlibatan tokoh agama, ormas dan juga satpol PP dalam mensukseskan kegiatan pemilu dan Pilkada menjadi penting. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Tangerang Selatan adalah dengan mengumpulkan tokoh masyarakat, MUI, FKUB, RW yang berjumlah 735 dalam 2 gelombang untuk dilakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan pemahaman hukum. Pemerintah daerah juga melibatkan Satpol PP untuk menjaga ketertiban, mereka melakukan siap siaga, bersama satuan-satuan di RW dan RT. Kelompok orari juga digandeng untuk berperan aktif mengawasi dan menyiapkan informasi yang terkait dengan kondisi masyarakat. Keterlibatan mereka sangat efektif untuk mencegah konflik. Tangerang Selatan mempunyai jaringan sedemikian rupa, sehingga provoator mengalami kesulitan untuk bisa masuk.

3. Tidak Mengobral Janji-janji Politik:

Setiap calon sebaiknya melakukan pendekatan kepada orang-orang yang secara materi cukup (pemilik program) dengan menjelaskan program dan *track record* calon. Dengan menyampaikan *track record* yang pernah dilakukan, pemilik modal yang berminat membantu kesuksesan pencalonan mendapatkan gambaran sosok pemimpin yang sesuai. Dengan jaminan track record serta kompetensi yang dimiliki oleh calon akan mengurangi adanya janji-janji politik yang akhirnya menjerat calon tersebut apabila mereka memenangkan kompetisi.

Tahapan Paska Pemilu/Pilkada:

Paska pemilu: Konsolidasi dengan tokoh, Kunjungan ke tokoh. Setelah pemilu dalam masa penghitungan, disitu titik rawannya karena ketidak puasan dari orang-orang yang merasa suaranya di curangi, dari perhitungan suara terjun satpol PP bersama KPU. Paska pemilu melakukan konsolidasi kunjungan ke tokoh-tokoh. Dalam menangani konflik pasca sangat panjang, mereka tidak siap untuk kalah. Esensinya kembali ke masalah ekonomi. Soslusi bagi yang memnag kita butuh bantuan, maka kita akan bantu. Yang penting sadar dulu. Kalau pileg relatif cair, dan relawan sedikit 2-10 org rata2 mereka keluar uang pribadi, ini mengkhawatirkan terkait modal. Kalau pilkada bisa 30 lebih. Bisa jadi 1 orang jadi timses lebih dari 2 calon walikota.

Upaya Mitigasi Konflik:

Bagaimana upaya mitigasi konflik pada saat dan setelah pemilu?, pertanyaan ini hadir pada saat konflik masyarakat akibat kegiatan politik (Pemilu dan Pilkada) di Indonesia mencuat. Fragmentasi pilihan masyarakat yang kuat mendorong masyarakat untuk mempertahankan pilihannya dengan cara apapun. Hadirnya dua calon yang berhadapan dalam pemilu (*Head to head*) menjadikan jarak masyarakat yang mempunyai perbedaan pilihan menjadi semakin kuat. Hal inilah yang membuat upaya pemulihan masyarakat dari konflik politik membutuhkan waktu yang lama. Apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani konflik menjadi kajian yang menarik. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan telah menyiapkan upaya mitigasi konflik politik melalui beberapa tahapan.

1. Menyiapkan Program Pembahasan Potensi Konflik

Selain menyiapkan melalui program-program yang dilaksanakan sebelum pemilu, pada saat pelaksanaan pemilu, serta kegiatan setelah pemilu, pemerintah kota Tangerang Selatan bersama Polres, kejaksaan, KPU membahas potensi-potensi konflik yang kemungkinan muncul pada kegiatan Pilkada dan Pemilu. Kerjasama ini dibangun karena Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak mempunyai alat-alat canggih. Untuk itu keterlibatan kepolisian

menjadi hal penting. Pada saat ini wilayah Tangerang Selatan dimonitor oleh pemerintah pusat. Untuk itu perlu sosialisasi massif kepada masyarakat terkait etika dan apa saja yang termasuk dalam pelanggaran serta sumber-sumber konflik. Namun kondisi tersebut juga tidak bisa dihindari, untuk itu Pemerintah Kota Tangerang Selatan berharap kepada masyarakat untuk tidak melakukan bentrok fisik yang memunculkan konflik horisontal.

2. Memetakan scope/wilayah jangkauan konflik

Upaya mitigasi akan lebih mudah dijangkau pada proses Pilkada. Walaupun konflik terjadi di masyarakat, namun bisa diatasi dengan baik. Konflik dengan jumlah peserta dalam Pilkada yang terbatas, 3 pasang atau 4 pasang akan lebih mudah mitigasinya. Tim sukses masing-masing calon sudah dapat diketahui dengan pasti dan terukur. Dengan tingkatan wilayah (lokal) memudahkan bagi mereka untuk dikenal oleh masyarakat. Pada Pilkada, figure calon membantu dalam pelaksanaan mitigasi konflik. Pilkada Tangsel Tahun 2019, telah mendorong salah satu calon yang memenangkan Pilkada untuk melakukan pendekatan dengan tim sukses masing-masing calon. Upaya untuk mendatangi tim sukses bertujuan untuk menjelaskan dan menenangkan situasi. Dalam hal ini figure calon kepala daerah wajib melakukan hal tersebut. Tujuannya adalah untuk meredakan kondisi dan menenangkan massa pendukung. Kalau tidak melakukan hal tersebut, maka situasi akan tambah panas.

Upaya mitigasi dalam kegiatan Pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan Pilpres lebih sulit dilaksanakan. Dengan cakupan nasional dan wilayah yang luas, membutuhkan waktu lama dan membutuhkan koordinasi yang panjang. Pilpres dan Pileg cenderung mengerahkan kekuatan massa dalam setiap kampanye sampai kompetisi berakhir. Kegiatan pilpres dan pileg melibatkan massa yang banyak baik massa partai maupun non partai, sehingga lebih sulit dalam melaksanakan program mitigasi. Terdapat beberapa intervensi juga dilakukan untuk meminimalisir konflik horizontal pada pelaksanaan pemilihan anggota legislatif. Melakukan penguatan pemahaman di masyarakat, bahwa pemilu, pileg dan pilkada adalah kompetisi. Sifat kompetisi itu ada yang menang dan ada yang kalah. Untuk itu pada peserta harus mempunyai sikap mau menerima kekalahan.

3. Kerjasama dan Sosialisasi Politik

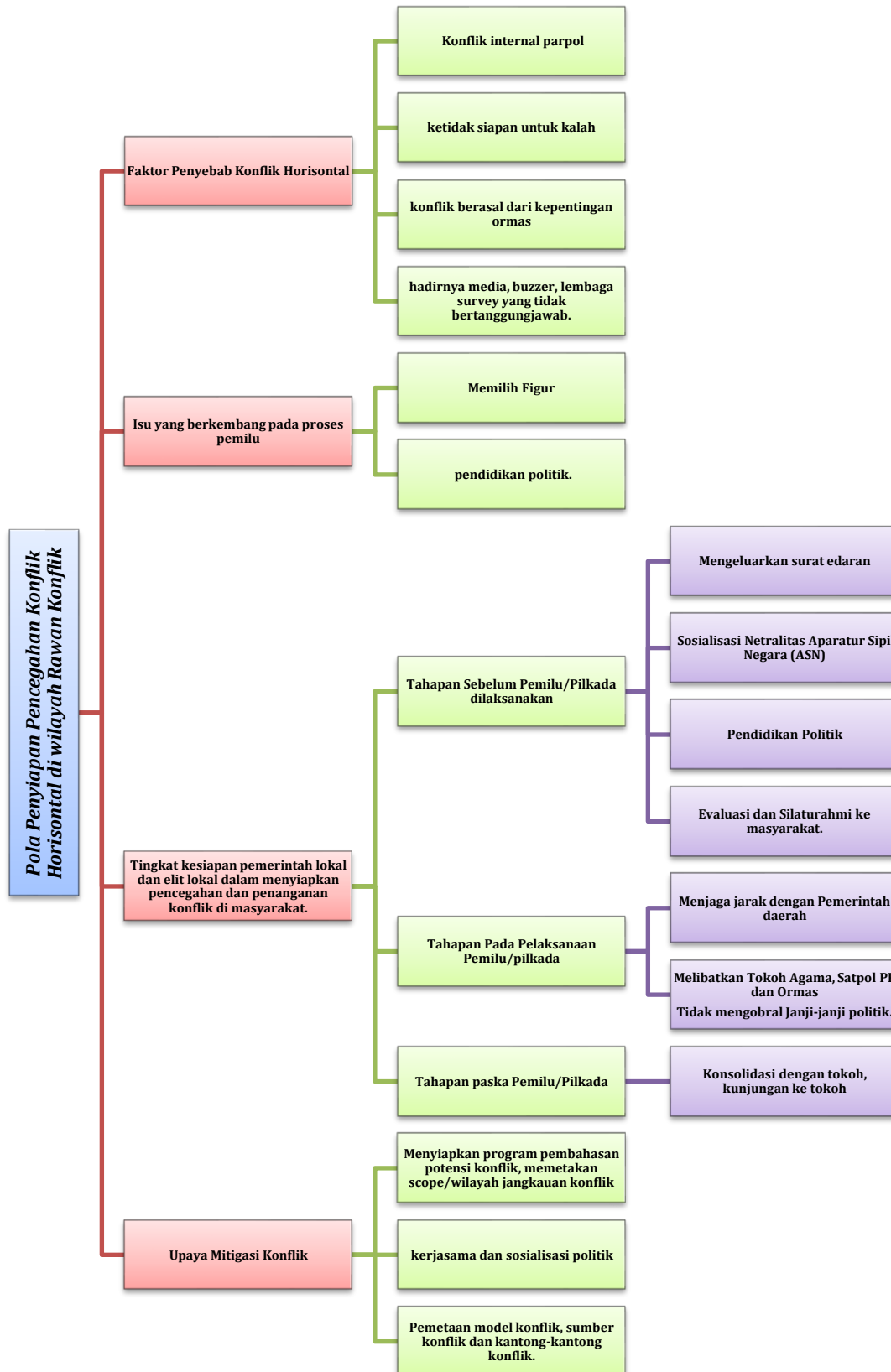
Upaya mitigasi konflik juga dapat dilakukan melalui kerjasama dan sosialisasi politik. Dengan demikian, konflik horisontal yang bersumber dari ormas yang dompleng sana sini dan berlindung dibalik tim sukses dan menyebabkan tindakan kriminal bisa dihentikan.

4. Pemetaan model konflik, sumber konflik dan kantong-kantong konflik

Pemetaan model konflik, sumber konflik dan kantong-kantong konflik di wilayah Kota Tangerang Selatan belum dilaksanakan. Masih menjadi pekerjaan rumah bagi Walikota Tangerang Selatan. Terutama untuk menyukseskan pemilu 2024. Indikator penting kesuksesan pemilu 2024 berbeda yaitu tidak ada kerusuhan fisik, namun kalau ada perselisihan dan gugatan disilahkan menyelesaikan dengan baik.

Bagan 1

Pola Penyiapan Pencegahan Konflik Horizontal di wilayah Rawan Konflik



Luaran Penelitian (Wajib dilengkapi LOA jika belum terbit, Screen shoot poster yang diupload dan modul bahan ajar)

LUARAN WAJIB:

1. Poster
2. Jurnal
3. Bahan ajar

LUARAN TAMBAHAN:

HKI

Kesimpulan, tidak lebih dari 500 kata

KESIMPULAN

1. Faktor Penyebab Konflik Horisontal; Konflik internal parpol, ketidak siapan untuk kalah, konflik berasal dari kepentingan ormas, hadirnya media, buzzer, lembaga survey yang tidak bertanggungjawab.
2. Isu yang berkembang pada proses pemilu: Memilih Figur, pendidikan politik.
3. Tingkat kesiapan pemerintah lokal dan elit lokal dalam menyiapkan pencegahan dan penanganan konflik di masyarakat. (1) Tahapan Sebelum Pemilu/Pilkada dilaksanakan: Mengeluarkan surat edaran, Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pendidikan Politik, Evaluasi dan Silaturahmi ke masyarakat. (2) Tahapan Pada Pelaksanaan Pemilu/pilkada: Menjaga jarak dengan Pemerintah daerah, Melibatkan Tokoh Agama, Satpol PP dan Ormas: Tidak mengobral Janji-janji politik. (3) Tahapan paska Pemilu/Pilkada: Konsolidasi dengan tokoh, kunjungan ke tokoh
4. Upaya Mitigasi Konflik: Menyiapkan program pembahasan potensi konflik, memetakan scope/wilayah jangkauan konflik, kerjasama dan osialissasi politik, Pemetaan model konflik, sumber konflik dan kantong-kantong konflik.

Ucapan Terima Kasih, ditujukan kepada Rektor UMJ, LPPM UMJ atas pendanaan dan fasilitasnya. Kepada Fakultas, Program Studi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan fasilitasnya sehingga penelitian ini berjalan dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan fasilitas dan pendanaan dalam penelitian internal melalui Kontrak penelitian internal tahun pelaksanaan 2022 antara Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan peneliti nomor: 324/r-umj/vi/2022 tertanggal 24 juni 2022

Daftar Pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

1. A. Arifulloh, "Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat," *Pembaharuan Huk.*, vol. 2, no. 2, pp. 301–311, 2015.
2. F. S. Ramadlan and R. Masykuri, "Marketing Isu Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2015-2018," *J. Penelit. Polit.*, vol. 15, no. 2, p. 249, 2018.
3. E. Siswanto, "Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 (Conflict of Elections for District Head of Jember in 2015)," *J. Polit.*, vol. 17, no. 2, pp. 286–312, 2017.
4. S. Humaedi, I. Kudus, R. Pancasilawan, and S. A. Nulhaqim, "Resolusi Konflik Pilkada Di Kota Cimahi Jawa Barat," *Share Soc. Work J.*, vol. 8, no. 1, p. 101, 2018.
5. T. Kharisma, "Konflik SARA pada Pilkada DKI Jakarta di Grup WhatsApp dengan Anggota Multikultural," *J. Penelit. Komun.*, vol. 20, no. 2, pp. 107–120, 2017.
6. L. Andriyani, M. Murod, E. Sulastri, D. Gunanto, M. Sahrul, and D. Andiani, "Relasi Kuasa

Elit Lokal Dan Pemerintah Lokal Dalam Penanganan Konflik Sosial Paska Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial,” *J. Ketahanan Nas.*, vol. 27, no. 1, pp. 39–64, 2021.

7. L. A. Coser, “Social Conflict and the Theory of Social Change,” *Br. J. Sociol.*, vol. 8, no. 3, p. 197, 1957.
8. Y. Univer-, “Social Conflict and Social Movements . by Anthony Oberschall Review by : Roberta Ash,” *Soc. forces*, vol. 52, no. 4, pp. 578–579, 2014.
9. F. Berkes and H. Ross, “Community Resilience: Toward an Integrated Approach,” *Soc. Nat. Resour.*, vol. 26, no. 1, pp. 5–20, 2013.
10. K. Magis, “Community resilience: An indicator of social sustainability,” *Soc. Nat. Resour.*, vol. 23, no. 5, pp. 401–416, 2010.
11. S. S. Luthar and D. Cicchetti, “The construct of resilience: Implications for interventions and social policies,” *Dev. Psychopathol.*, vol. 12, no. 4, pp. 857–885, 2000.
12. M. M. Hikmat, “Pemetaan Masalah dan Solusi Konflik Lokal dalam Pilkada Langsung di Indonesia,” *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, vol. 30, no. 1. p. 18, 2014.
13. Bawaslu RI, “Potensi Penggunaan Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018,” vol. 1, p. 82, 2017.
14. I. Nehrun, “Konflik Elit Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Gorontalo Tahun 2013,” *Otoritas J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 6, no. 1, p. 42, 2016.
15. R. Sembiring and M. Simanihuruk, “Politik Dinasti dan Desentralisasi,” *Talent. Conf. Ser. Local Wisdom, Soc. Arts*, 2018.
16. F. Mahadhika Putra, “Radikalisasi isu agama dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017,” *Dep. Polit. dan Pemerintah. Univ. Diponegoro*, pp. 1–10, 2017.
17. D. R. Fimmastuti, A. Pramusinto, and D. Soerjo, “Persepsi Dan Tindakan Politik Pemuda Terhadap Gerakan Jogja Independent (JOINT) Dalam Pelaksanaan Pilwalkot Kota Yogyakarta Tahun 2017 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Pemuda (Studi Pada Relawan Jogja Independent (JOINT) di Kota Yogyakarta),” *J. Ketahanan Nas.*, vol. 24, no. 1, p. 94, 2018.
18. A. M. H. P. S. T. J. Tarmizi, “LAPORAN KINERJA 2018,” Jakarta, 2018.
19. P. S. Rahmat, “Penelitian Kualitatif,” *Journal Equilibrium*. 2009.
20. dst.

Jadwal Penelitian disusun dengan mengisi membuatnya dalam bentuk tabel dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.

JADWAL PENELITIAN

| No | Nama Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Review proposal dan telaah konflik sosial di Tangsel-Banten | X | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyusunan instrument penelitian sinergitas lembaga, elit dan komunitas dalam penanganan konflik horisontal | X | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pengumpulan data lapangan melalui wawancara ke lembaga pemerintahan di Banten, Elit Lokal, Komunitas di Tangsel | | X | X | | | | | | | | | |
| 4 | Melakukan analisis data lapangan | | | X | X | | | | | | | | |
| 5 | Menyusun luaran hasil penelitian: drfat jurnal, poster, HAKI, draft prosiding | | | | X | X | | | | | | | |
| 6 | Menyusun laporan akhir : sinergitas lembaga, elit dan komunitas dalam penanganan konflik horizontal di wilayah Tangerang Selatan-Banten | | | | | | X | | | | | | |

Rencana Anggaran Belanja disusun dengan format tabel dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai kebutuhan.

RENCANA ANGGARAN BELANJA

| No | Jenis Pembelanjaan | Komponen | Item | Satuan | Vol | Biaya Satuan | Total |
|-----|-------------------------------------|--------------------------|--|----------|-----|--------------|------------------|
| I | Alat & Bahan | Bahas habis pakai | Kertas, tinta, bolpoint | Paket | 1 | 500,000,- | 500,000,- |
| | | Bahan habis pakai | Poster | Design | 2 | 250,000,- | 500,000,- |
| | | Bahan habis pakai | Kuota | Orang | 5 | 150,000,- | 750,00 |
| | | Nahan habis pakai | Materai | Buah | 10 | 7000 | 70,000,- |
| II | Pengumpulan Data | FGD persiapan penelitian | Review proposal dan penyusunan instrumen | Paket | 1 | 1,000,000, | 1,000000 |
| | | FGD | Penggalian data narasumber | Paket | 1 | 2,000,000 | 2,000000 |
| III | Analisis Data | Pengolahan data | Pengolahan data | Paket | 1 | 1,500,000 | 1,500000 |
| IV | Pelaporan, Luaran Penelitian | Luaran | Seminar nasional | Kegiatan | 1 | 350,000 | 350,000 |
| | | Luaran | jurnal | kegiatan | 1 | 750,000 | 750,000 |
| | | Laporan | Fc laporan | Paket | 1 | 80,000 | 80,000 |
| | TOTAL | | | | | | 7,500,000 |
| V | Inkind | | | | | | |
| | Fasilitas UMJ | Fasilitas Inkind | | 1 Paket | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |

**Total dana Penelitian sesuai dengan pagu anggaran pada setiap usulan simlitabmas*

Lampiran Surat Kesiediaan Melaksanakan Penelitian

Lampiran Surat Kesiediaan Melaksanakan Penelitian

**SURAT KESEDIAAN
MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Ketua Peneliti | : | Dr.Lusi Andriyani.,M.Si |
| NIDN | : | 0001027801 |
| Fakultas | : | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| Anggota Peneliti 1 | : | Henny Wijayanti.,SH.,MH |
| Anggota Peneliti 2 | : | Dr. Mohamad Nasih |
| Anggota Mahasiswa 1 | : | Luthfiyani Nurul Jannah (NPM. 2019130022) |
| Anggota Mahasiswa 2 | : | Putri Ade Fitriani (NPM. 2019130045) |
| Judul proposal Penelitian | : | Sinergitas Pemerintah Lokal, Elit Lokal dan Komunitas Dalam Penyiapan Pencegahan Konflik Horisontal di wilayah Rawan Konflik |

Dengan ini menyatakan kesiediaan untuk melaksanakan penelitian, memenuhi laporan akhir dan luaran wajib pada hibah penelitian internal Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Tahun Anggaran 2022. Jika tidak melaksanakan maka saya akan mengembalikan dana dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan dalam Panduan Penelitian ini.

Jakarta, 13 Mei 2022

Peneliti,



(Dr. Lusi Andriyani.,M.Si)

